
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**RENJA
2026**



**CREATING
FUTURE TOGETHER**



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara
Telp / Fax (0541) 6669019 Alamat Email: satpolpp@kukarkab.go.id - Kode Pos : 75511

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Nomor : P-577/PolPP/Set.1/000.8/03/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dalam Menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 perlu di bentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 71).

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam menjalankan tugas-tugasnya senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 25 Maret 2025





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ARFAN BOMA PRATAMA, AP
Pembina Utama Muda



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA NOMOR P-
577/PolPP/Set.1/000.8/03/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025

Jabatan dalam Tim	Nama / NIP
Pengarah	Sekretaris Daerah
Penanggung Jawab	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Ketua	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
Sekretaris	Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan
Anggota	Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
Anggota	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Anggota	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
Anggota	Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
Anggota	Sony Yudianto, SE NIP. 19750615 200502 1 002

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 25 Maret 2025





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ARFAN BOMA PRATAMA, AP
Pembina Utama Muda



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah Nya dengan berkenan dan ridho Nya semata Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2026 ini dapat tersusun.

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Renja SKPD ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja pemerintah Daerah).

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 sebagai penjabaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 disusun dan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
ARFAN BOMA PRATAMA, AP
Pembina Utama Muda



DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	1
1	BAB I PENDAHULUAN	4
1.1	Latar Belakang	4
1.2	Landasan Hukum	4
1.3	Maksud dan Tujuan	6
1.4	Sistematika Penulisan	6
2	BAB II EVALUASI RENJA-PD TAHUN LALU	9
2.1	Evaluasi Pelaksanaan RENJA-PD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA-PD	9
	<i>Tabel II.1 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)</i>	12
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	19
	<i>Tabel II.2 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja</i>	20
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD	23
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	24
	<i>Tabel II.3 (review terhadap rancangan RKPD 2026)</i>	24
2.5	Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	25
	<i>Tabel II.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025</i>	25
3	BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	26
3.1	Telaahan terhadap kebijakan nasional	26
3.2	Tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja	27
	<i>Tabel III.5 tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan SATPOL PP</i>	28

4	BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	29
4.1	Program dan Kegiatan	29
	<i>Tabel IV.6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026</i>	29
5	BAB V PENUTUP	30



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu kondisi dinamis yang memungkinkan Pemerintah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan-kegiatan dengan tenteram, tertib dan teratur. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum serta menegakkan Peraturan Daerah, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk mengemban tugas dan fungsinya kearah terselenggaranya kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Seiring dengan semakin berkembangnya pembangunan, teknologi dan Sumber Daya Masyarakat, peran Satuan Polisi Pamong Praja sangatlah strategis dalam mendukung jalannya pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Daerah. Dalam setiap pelaksanaan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja harus selalu mengedepankan azas kemanusiaan namun tetap tegas dalam bertindak. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Satuan Polisi Pamong Praja selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan Instansi terkait dan masyarakat dalam upaya menciptakan situasi yang tertib, tentram dan aman.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja atau Renja SATPOL PP 2026 merupakan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2026. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 tersebut berupa dokumen perencanaan tahunan yang berisi tentang penjabaran dari Rencana Strategis (RENCANA KERJA (RENJA)) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
7. Peraturan Pemerintah Nomor No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja pemerintah Daerah);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

15. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026.
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 adalah menyediakan acuan sebagai arah kebijakan program dan kegiatan yang secara umum akan dilaksanakan oleh SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SATPOL PP di tahun 2026, serta akan menjadi tolak ukur dan evaluasi kinerja SATPOL PP pada khususnya dan kinerja Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara pada umumnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Renja Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, mencakup :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) yang terdiri dari :

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja-PD, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja-PD dengan dokumen RKPD, RENSTA-PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan penyusunan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja-PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Meguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja-PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA-PD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA-PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA-PD Tahun lalu (tahun n-2/2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja-PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA-PD tahun-tahun sebelumnya.

Tabel T-C 29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (tahun berjalan)*

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan dan sasaran Reja-PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra-PD.

BAB IV RENCANA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
 - b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- Tabel rencana program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA-PD TAHUN LALU



2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA-PD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA-PD

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja SATPOL PP Tahun 2024 didasarkan pada Renstra SATPOL PP Tahun 2021-2026. Pada Renja SATPOL PP Tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 2 program dan 34 kegiatan.

Berikut gambaran capaian realisasi program dan kegiatan :

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan/ Keluaran	VOLUME/ PAGU		TOTAL			STATUS PELAKSANAAN (%)
		K	Satuan	K	Satuan	%.	
1.05.1.05.01							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp555.278.000		Rp498.421.051		89,76%	
1	1.05.01.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dokumen	11	Dokumen	100,00%	100,00%
1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp378.592.004		Rp329.209.444		86,96%	
2	1.05.01.2.01.0006.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	Laporan	15	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp17.917.513.282		Rp17.556.615.384		97,99%	
3	1.05.01.2.02.0001.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336	Orang/Bulan	336	Orang/Bulan	100,00%	100,00%

1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp120.000.000		Rp105.778.897		88,15%	
4	1.05.01.2.02.0005.01 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Rp424.182.000		Rp398.122.051		93,86%	
5	1.05.01.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15	Laporan	15	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
1.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Rp11.270.600		Rp11.266.000		99,96%	
6	1.05.01.2.05.0003.01 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10	Dokumen	10	Dokumen	100,00%	100,00%
1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp15.550.566		Rp14.890.000		95,75%	
7	1.05.01.2.05.0010.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	50	Orang	100,00%	100,00%
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah							
1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp251.345.753		Rp242.066.000		96,31%	
8	1.05.01.2.06.0002.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	67	Paket	67	Paket	100,00%	100,00%
1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp135.972.000		Rp117.978.600		86,77%	
9	1.05.01.2.06.0004.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21	Paket	21	Paket	100,00%	100,00%
1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp46.526.300		Rp33.212.000		71,38%	
10	1.05.01.2.06.0005.01 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7	Paket	7	Paket	100,00%	100,00%
1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp793.620.390		Rp743.605.219		93,70%	
11	1.05.01.2.06.0009.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95	Laporan	95	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp425.926.600		Rp393.189.404		92,31%	
12	1.05.01.2.06.0010.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8	Dokumen	8	Dokumen	100,00%	100,00%
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp10.222.200		Rp10.220.000		99,98%	
13	1.05.01.2.08.0001.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp141.582.071		Rp64.334.039		45,44%	
14	1.05.01.2.08.0002.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	100,00%

1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp44.950.000		Rp43.435.000		96,63%	
15	1.05.01.2.08.0003.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp6.813.789.300		Rp6.773.712.500		99,41%	
16	1.05.01.2.08.0004.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp1.038.938.300		Rp905.358.550		87,14%	
17	1.05.01.2.09.0002.01 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	81	Unit	81	Unit	100,00%	100,00%
1.05.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Rp33.030.000		Rp0		0,00%	
18	1.05.01.2.09.0008.01 Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	Unit	1	Unit	100,00%	100,00%
1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp123.053.200		Rp101.755.200		82,69%	
19	1.05.01.2.09.0009.01 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	2	Unit	100,00%	100,00%
1.05.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Rp64.652.000		Rp64.652.000		100,00%	
20	1.05.02.2.01.0003.01 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	5	Dokumen	5	Dokumen	100,00%	100,00%
1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		Rp15.726.456.396		Rp15.257.374.742		97,02%	
21	1.05.02.2.01.0004.01 Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25	Dokumen	25	Dokumen	100,00%	100,00%
1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Rp647.558.440		Rp427.708.520		66,05%	
22	1.05.02.2.01.0005.01 Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200	Orang	200	Orang	100,00%	100,00%
1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Rp28.515.000		Rp28.270.000		99,14%	
23	1.05.02.2.01.0006.01 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	13	Dokumen	13	Dokumen	100,00%	100,00%

1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		Rp160.000.000		Rp117.377.800		73,36%	
24	1.05.02.2.01.0008.01 Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	100,00%
1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Rp399.419.000		Rp399.244.000		99,96%	
25	1.05.02.2.01.0015.01 Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.484	Laporan	1.484	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							
1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Rp233.379.000		Rp194.733.800		83,44%	
26	1.05.02.2.02.0010.01 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	20	Laporan	20	Laporan	100,00%	90,00%
1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Rp187.464.000		Rp161.354.000		86,07%	
28	1.05.02.2.02.0012.01 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	150	Laporan	150	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota							
1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Rp119.761.000		Rp112.700.645		94,10%	
29	1.05.02.2.03.0006.01 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	3	Laporan	3	Laporan	100,00%	100,00%

2. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan/Keluaran	VOLUME/ PAGU		TOTAL			STATUS PELAKSANAAN (%)
		K	Satuan	K	Satuan	%.	
1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							
1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah		Rp304.389.000		Rp270.179.206		88,76 %	
27	1.05.02.2.02.0011.01 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali KotaJumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Dit	100	Laporan	95	Laporan	95,00 %	95,00%
Target 100 tindakam TIPIRING tidak berhasil karena proses kerjasama dengan pihak kejaksaan tidak berjalan dengan maksimal							

Berdasarkan data realisasi diatas, maka tabel berikut akan menggambarkan perbandingan antara evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dengan pencapaian RENSTRA SKPD.

Tabel II.1 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)*
Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel II.1 (T-C. 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan		Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2024)			Target program dan kegiatan (RenjaD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)			
								Target RENJA tahun (2024)	Realisasi RENJA Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2		3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
	Urusan Wajib Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat														
	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		Jumlah penurunan angka penanganan gangguan trantibum	5000	angka										
	1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Jumlah peningkatan pencegahan gangguan trantibum	9610	angka	510	Dokumen	1484	1484	Kasus	100%	1484	3478	Kasus	36%
	2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Presentase peningkatan gangguan trantibum	100	Persen	0	Persen	100	0	Persen	0%	0	0	Persen	0%
	3	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	20	Kali	0	dokumen	4	0	dokumen	100%	4	4	kali	20%

4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah regu perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	125	regu	25	regu	25	25	regu	100%	25	75	Regu	60%
5	Peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Jumlah satpol yang bersertifikat	1000	orang	0	orang	200	0	Orang	80%	160	160	Orang	16%
6	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen kesepakatan kerjasama	25	dokumen	5	Dokumen	5	5	Dokumen	100%	5	15	Dokumen	60%
7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah sarana dan prasarana trantibum yang dipelihara	150	unit	18	Unit	30	18	Unit	60%	18	54	Unit	36%
8	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah dokumen SOP trantibum	3	dokumen	1	persen	1	1	Persen	100%	1	3	Persen	100%
9	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkada	Persentase layanan dampak penegakan perda	100	persen	100	Dokumen	100	100	Dokumen	100%	100	300	Dokumen	100%
Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota		Jumlah perda yang ditegakkan	14	angka										
10	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah frekuensi sosialisasi perda/perkada	20	kali	4	Kali	4	4	Kali	100%	4	12	kali	60%

11	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah temuan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	500	pelanggaran	0	objek	150	150	Kasus	100%	150	300	Kasus	60%
12	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditindaklanjuti	500	kali	0	Penegakan perda	150	0	Penegakan perda	47%	70	70	Kasus	14%
Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kabupaten/kota		Jumlah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kabupaten/kota yang dibina	5	orang										
13	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja yang bersertifikat PPNS	5	orang	1	Orang	1	1	Orang	100%	1	3	Orang	60%
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah dokumen rencana anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	130	dokumen										
14	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	55	dokumen	11	dokumen	11	11	Dokumen	100%	11	33	Dokumen	60%
15	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	75	Dokumen	15	dokumen	15	15	Dokumen	86%	12	42	Laporan	56%
Administrasi keuangan perangkat daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	85	dokumen										
16	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	9900	orang	12	Orang/bulan	1980	12	Orang/bulan	67%	1338	1362	Orang	14%

17	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun OPD	9900	orang	1	dokumen	1	1	Dokumen	100%	1	3	Dokumen	3%
18	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	75	dokumen	15	dokumen	15	15	Dokumen	86%	13	43	Laporan	17%
Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Jumlah laporan administrasi kepegawaian	62	dokumen										
19	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	125	stel	0	buah	1	0	buah	100%	1	1	Paket	80%
20	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	50	dokumen	1	dokumen	10	1	Dokumen	100%	10	12	Dokumen	24%
21	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	40	orang	20	orang	20	20	Orang	100%	20	60	orang	100%
22	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan-undangan	250	orang										

Administrasi umum perangkat daerah		Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	30	layanan										
23	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	335	jenis	61	Rim/ buah/ kotak	67	61	Rim/ buah/ kotak	100%	67	189	Paket	56%
24	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	105	jenis	38	jenis	5	38	jenis	100%	5	81	Paket	77%
25	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan penggandaan yang disediakan	35	jenis	24.340	paket	7	24.340	Paket	28%	2	48.682	Paket	100%
26	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan advetorial yang disediakan	300	exemplar										
27	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi OPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi OPD yang diselenggarakan	1125	orang	56	orang	167	56	orang	80%	135	247	Laporan	22%
28	Penatausahaan arsip dinamis pada OPD	Jumlah arsip pada unit pencipta pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan	1671	Berkas	0	arsip								
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah	100	persen										
29	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan operasional kantor yang tersedia	2	unit	1	Unit								
30	pengadaan mabel	jumlah mabel kantor yang tersedia	6	unit	3	unit								
31	Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang tersedia	2	paket										

32	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang tersedia	24	unit	0	unit	28	0	unit	100%	28	28	Unit	100%
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	60	bulan										
33	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat	60	Bulan	715	lembar	12	715	Lembar	100%	12	1.442	Lembar	100%
34	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	Bulan	12	rekening	12	12	rekening	100%	12	36	Bulan	50%
35	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	60	bulan	6	bulan	12	6	Bulan	100%	12	24	Bulan	40%
36	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor 2.penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	60	1.bulan 2. bulan	11	bulan	1. 12 2. 12	11	bulan	75%	1. 9 2. 9	31	bulan	19%
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Jumlah barang milik daerah	425	unit										
37	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang mendapatkan pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak	405	unit	78	unit	81	78	Unit	100%	81	237	Unit	58%
38	Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	10	unit	2	Unit	2	2	Unit	100%	2	6	Unit	60%
39	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10	unit	2	gedung	2	2	gedung	100%	2	6	Unit	60%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dapat dijabarkan dalam bentuk capaian Indikator :

- 1. IKU (Kinerja Utama),
- 2. SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan
- 3. IKK (Indikator Kinerja Kunci) .

Target pada masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

2.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target IKU :

No	IKU	Indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2026	2026
1	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah	jumlah pelanggaran produk hukum daerah	Kasus	100	100	100	100	100
Keterangan : Kinerja SATPOL PP meningkat jika terjadi penurunan angka sebesar 100 kasus dalam setiap tahunnya melalui penindakan TIPIRING.								

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 :

No	IKU	Indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Target 2025
1	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah	jumlah pelanggaran produk hukum daerah	Kasus	100	95	100
Analisis : Target penurunan angka pelanggaran adalah 100 kasus setiap tahunnya, pada tahun 2024, SATPOL PP hanya mampu melakukan tindakan TIPIRING sebanyak 395 kasus, sehingga target 100 kasus tidak tercapai. Hal disebabkan antara lain : 1. kerjasama antar instansi vertikal yaitu SATPOL PP, Kejaksaan dan Kehakiman belum terjalin dengan maksimal. 2. Keterlambatan melaksanakan kegiatan yustisial TIPIRING, sehingga waktu pelaksanaan tidak cukup banyak.						

2.2.2. SPM (Standar Pelayanan Minimal)

Target SPM :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	Persen	100	100	100	100	100

Capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Tahun 2024 :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Target 2025
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	Persen	100	100	100
Analisis : Dalam melaksanakan penegakan Perda dan Perkada, SATPOL PP selalu mengepankan tindakan persuasif dan humanis, sehingga sepanjang tahun 2024 tidak terdapat warga negara yang merasa dirugikan baik secara moril maupun materiil.						

2.2.3. IKK (Indikator Kinerja Kunci)

Target dan Realisasi IKK :

No	IKK Outcome	IKK Output	Target	Rumus	Realisasi
					2024
1	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan		100%	1. Jumlah Pengaduan Yang ditangani	16
				2. Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang Masuk	16
		1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	1484		1484
		2. Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan	2795		2795
		3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	60		37
		4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	3		10

		5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	7		7	
		6. Tersedianya sarana prasarana minimal	554		554	
2	Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan		64	1. Jumlah Perda/Perkadayang Memuat Sanksiyang Ditegakkan	37	61
				2. Jumlah Keseluruhan Perda Dan Perkada Yang Memuatsanksi	60	

Dalam pelaksanaan kewenangan , tugas pokok dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Daerah dengan ruang lingkup Pembinaan dan Pendekatan pada perorangan / kelompok masyarakat, dan Penindakan Preventive non yustisial (Surat Teguran). Dibidang Penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat ruang lingkupnya meliputi Pengamanan, tempat, aset daerah, Pengerahan anggota dalam pengamanan dan pemantauan dalam penanganan unjuk rasa / demo, konflik sosial dll, Terlaksananya pengamanan (PAM) dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala masal, Terlaksananya pengawalan dan pengamanan pejabat negara, daerah, tamu VIP, VVIP, negara, dan daerah, Penertiban, pengawasan, pengendalian dan pengamanan pemasukan pajak daerah, sumber PAD, serta objek vital daerah.

Tabel II.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kutai Kartanegara

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11		12	13
1	jumlah pelanggaran produk hukum daerah			100	100	100	100	35	95	100	100	
4		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Capaian Tahun 2024 100% karena tidak ada warga negara yang melakukan pengaduan akibat penegakan hukum perda/perkada
5			(IKK Outcome) Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah Pengaduan Yang ditangani (16)
												Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang Masuk (16)
6			(IKK) 1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum	1484	1484	1484	1849	1484	1484	1484	1849	

			dalam Kab/Kota yang ditangani									
7			2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Na	Na	Na	Na	Na	2795			
8			3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		49	60	60	17	37	60	60	
9			4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS					3	3	3	3	
10			5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum 6. Tersedianya sarana prasarana minimal			4064	4064	554	7 554	4064	4064	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD

Tupoksi SATPOL PP adalah Menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan. Secara umum, setiap tahun kinerja pelayanan trantibum selalu bernilai 100%, hal ini berarti SATPOL PP selalu melakukan tugasnya dengan maksimal. Akan tetapi, keberhasilan tersebut tidak menyebabkan angka pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan) di wilayah Kutai Kartanegara berkurang, ini berarti tugas pelayanan trantibum oleh SATPOL PP tidak membawa dampak yang optimal.

Beberapa hal yang menyebabkan hal ini terjadi antara lain adalah mutu pelayanan trantibum anggota dalam penegakan trantibum masih rendah, sarana dan prasarana penegakan perda belum optimal, lokasi pelanggaran trantibum sulit dijangkau, kurangnya sosialisasi mengenai K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan) di masyarakat dan kerjasama antar Instansi terkait belum terjalin optimal.

Isu-isu strategis, tantangan dan peluang yang harus disikapi SATPOL PP untuk perencanaan kinerja pada tahun-tahun berikutnya adalah antara lain Kutai Kartanegara memiliki 108 perda yang memuat sanksi, cakupan luas wilayah Kutai Kutai Kartanegara yang sangat besar. Antar kecamatan harus ditempuh dengan waktu sampai lebih dari dua jam, di setiap Kecamatan terdapat Seksi Trantib, akan tetapi tugas pelayanan trantibum tidak dapat dilakukan dengan maksimal karena Seksi Trantib Kecamatan hanya berfungsi secara koordinasi dengan SATPOL PP, disamping itu, sangat perlu untuk melakukan analisis Pendidikan dan pelatihan yang mendukung ke arah pelayanan penegakan trantibum yang berdampak pada penurunan angka pelanggaran trantibum dan perda.

Langkah-langkah yang harus diambil SATPOL PP dalam menyikapi isu strategis, tantangan dan peluang tersebut adalah percepatan Langkah dan akselerasi dalam mencapai target kinerja, penguatan peran dan fungsi SATPOL PP di masyarakat dan penguatan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis sumber daya anggota SATPOL PP.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Veriflkasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhlrn Klasiflkasi, Kodeflkasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah pedoman bagi seluruh pemerintah daerah untuk mewujudkan single codebase, berupa penggolongan atau pengelompokan dan pemberian kode. Disamping itu sebagai daftar penamaan untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban untuk pelaporan kinerja dan keuangan. sejak terbitnya Permendagri dan Kepmendagri tersebut, maka berpengaruh juga terhadap perencanaan kegiatan dan penganggaran SATPOL PP. Berdasarkan Kepmendagri 50 tahun 2021, maka program SATPOL PP menjadi satu program utama yaitu Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SATPOL PP termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Indikator dan target SPM SATPOL PP yang terdapat pada peraturan tersebut adalah :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100 %	Setiap Tahun

Hasil penjabaran Program dan Kegiatan SATPOL PP sesuai dengan Kepmendagri 50 tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel T-C.31 (Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026) berikut :

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting			
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan		Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	43	persen	1.182.476.700	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	43%	2.843.086.000	
				Persentase Penanganan Gangguan K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	100	persen					Persentase Penanganan Gangguan K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	100%		
1		1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		jumlah penurunan angka penanganan gangguan trantibum	1100	kasus	702.186.800		1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		jumlah penurunan angka penanganan gangguan trantibum	1100	1.993.086.000	

1	1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kutai Kartane gara	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	184 9	kasus	325.698.000	1	1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kutai Kartane gara	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12	800.000.000	- Pelaksanaan Patroli di 20 kecamatan- Pengawalan Bupati dan Pejabat Penting Daerah- Penambahan jumlah personil di setiap kegiatan pengamanan
2	1.05.02.2.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kutai Kartane gara	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12	kasus	50.000.000	2	1.05.02.2.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kutai Kartane gara	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12	50.000.000	

3	1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kutai Kartane gara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan KoordinasiPenyelenggar aan Ketenteraman, KetertibanUmum dan Perlindungan Masyarakat TingkatKabupaten/Kota	4	Doku men	17.478.000	3	1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kutai Kartane gara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan KoordinasiPenyelenggar aan Ketenteraman, KetertibanUmum dan Perlindungan Masyarakat TingkatKabupaten/Kota	4	100.000.000	
4	1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kutai Kartane gara	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25	Doku men	75.527.500	4	1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kutai Kartane gara	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2	382.694.000	penambahan target
5	1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kutai Kartane gara	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200	Orang	100.000.000	5	1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kutai Kartane gara	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	21	500.000.000	

6	1.05.02.2.01.06 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kutai Kartane gara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	5	Doku men	23.483.300	6	1.05.02.2.01.06 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kutai Kartane gara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	5	-	kerjasama dengan 12 Instansi terkait penegakan perda1 forum kerjasama antar OPD terkait pengakan perda
7	1.05.02.2.01.07 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kutai Kartane gara	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	30	Unit	100.000.000	7	1.05.02.2.01.07 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kutai Kartane gara	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	24	150.392.000	
8	1.05.02.2.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	100	Lapora n	10.000.000	8	1.05.02.2.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	100	10.000.000	perubahan target
2	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Kukar	jumlah perda yang ditegakkan	3	angka	420.289.900		1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Kukar	jumlah perda yang ditegakkan	3	700.000.000	

9		1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	4	Lapora n	97.767.500	9	1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	25	150.000.000	sosialisasi perda dilaksanakan di 20 kecamatan
1 0		1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100	Lapora n	120.000.000	1 0	1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	240	200.000.000 ,00	peningkatan target
1 1		1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	100	Lapora n	202.522.400	1 1	1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	240	350.000.000	peningkatan target
3		1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang dibina	1	orang	60.000.000		1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang dibina	1	150.000.000	

1 2	1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kantor SATPOL PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1	Lapora n	60.000.000	1 2	1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kantor SATPOL PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	4	150.000.000	menambahan target menjadi 3 orang PPNS
2	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		nilai SAKIP Perangkat Daerah	76		#REF!	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		nilai SAKIP Perangkat Daerah	76	36.836.573. 345		
4	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26	doku men	140.000.000	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26	500.000.000		
1 3	1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor SATPOL PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	dokum en	70.000.000	1 3	1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor SATPOL PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	150.000.000	bertambahnya data-data dan aplikasi yang harus dilengkapi, sehingga perlu penambahan rapat-rapat baik internal dan mengundang narasumber

1	4	1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor SATPOL PP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	lapora n	70.000.000	1	4	1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor SATPOL PP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	50.000.000	bertambahnya data-data dan aplikasi yang harus dilengkapi, sehingga perlu penambahan rapat-rapat baik internal dan mengundang narasumber
1	5	1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor SATPOL PP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	lapora n		1	5	1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor SATPOL PP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	100.000.000	
1	6	1.05.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Kantor SATPOL PP	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	31	Data				1.05.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Kantor SATPOL PP	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	31	200.000.000	
5		1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	17	doku men	15.120.160. 065			1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	17	27.375.581. 153	
	1 7	1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	198 0	dokum en	14.998.354. 465	1	7	1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4488	26.875.581. 153	

18	1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	21.805.600		1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	50.000.000	bertambahnya data-data dan aplikasi yang harus dilengkapi, sehingga perlu penambahan rapat-rapat baik internal dan mengundang narasumber
19	1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	15	laporan	100.000.000		1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	12	450.000.000	honorarium PA, Bendahara, 5 KPA, 5 Bendahara Pembantu, PP Keuangan, PP Barang

6	1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kantor SATPOL PP	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah					1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kantor SATPOL PP	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		25.000.000	
20	1.05.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor SATPOL PP	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	dokumen			1.05.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor SATPOL PP	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	25.000.000	

7	1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerahh		Kantor SATPOL PP	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	dokumen		1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerahh	Kantor SATPOL PP	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		219.580.000	
	21	1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5	-	
	22	1.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor SATPOL PP	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor SATPOL PP	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10	19.580.000	
	23	1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	50.000.000	
24		1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor SATPOL PP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor SATPOL PP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	150.000.000	
8	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	layanan	196.096.500	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	1.055.000.000	

25		1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. KUKAR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	67	paket	80.000.000	25	1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. KUKAR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	135.000.000	perubahan target
26		1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. KUKAR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21	paket	44.600.000	26	1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. KUKAR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	550.000.000	penyesuaian target dan anggaran
	27	1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. KUKAR	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	paket	6.031.500		1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. KUKAR	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	20.000.000	penyesuaian target dan anggaran
	28	1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225	laporan	65.465.000		1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	300.000.000	penyesuaian target dan anggaran
	29	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		dokumen			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3	50.000.000	Dengan memperhatikan tingkat urgensi, kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD yang sempat dihilangkan dalam 2 tahun anggaran, diusulkan kembali di APBD TA 2024.
9	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	bulan	7.285.987.192	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	5.861.412.192	

30	1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	4.015.000		1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	20.000.000	penyesuaian target dan anggaran
31	1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. KUKAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	100.000.000	31	1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. KUKAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	150.000.000	penyesuaian target dan anggaran
32	1.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. KUKAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	laporan	25.000.000	32	1.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. KUKAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	69.440.000	penyesuaian target dan anggaran
33	1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	7.156.972.192		1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	5.621.972.192	penyesuaian target dan anggaran
10	1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	22 %	unit	452.409.000		1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	21,87 %	1.700.000.000	

34		1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor SATPOL PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	81	unit	354.355.000	34	1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor SATPOL PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	84	1.170.000.000	- pengurangan target unit kendaraan berdasarkan evaluasi BPKAD - penyesuaian kenaikan harga BBM dan perawatan kendaraan	
35		1.05.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kantor SATPOL PP	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2	unit	20.000.000	35	1.05.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kantor SATPOL PP	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	30.000.000	Penyesuaian biaya sewa webhosting (sesuai pembayaran webhosting tahun 2022)	
36		1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor SATPOL PP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i	2	unit	78.054.000	36	1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor SATPOL PP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i	1	500.000.000	penyesuaian anggaran	
1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Kantor SATPOL PP	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Kantor SATPOL PP	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan		100.000.000	
37		1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8	-	- pengurangan target unit kendaraan berdasarkan evaluasi BPKAD - penyesuaian kenaikan harga BBM dan perawatan kendaraan	

3	8	1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	100.000.000	Penyesuaian biaya sewa webhosting (sesuai pembayaran webhosting tahun 2022)
													39.679.659. 345	

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Sebagai pengemban amanat penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki program dan kegiatan yang bersifat usulan dari Para Pemangku Kepentingan.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
					tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat terhadap SATPOL PP



TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2021-2026 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2026 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2026, sasaran pembangunan jangka menengah 2021-2026 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2021-2026 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJM Nasional tahun 2021-2026 sebagai berikut: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari pada Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan secara nasional dibawah Kementrian Dalam Negeri, dimana pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan dari pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: "Kementerian Dalam Negeri mampu Menjadi poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi

Bangsa”, dan Misi no 2 yaitu Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.

Dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda, sebagai pelaksana dilapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut di emban oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang didalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 148, 149 UU No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, bahwa (1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun wewenang Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor: 6 tahun 2010 Bab III pasal 6. Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 88 tahun 2012, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

SPM adalah singkatan dari Standar Pelayanan Minimal. SPM adalah ketentuan yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diberikan pemerintah kepada warga negara. SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Penerapan SPM menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyusunan APBD, belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait SPM.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SATPOL PP termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Indikator dan target SPM SATPOL PP yang terdapat pada peraturan tersebut adalah :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100 %	Setiap Tahun

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja

Isu strategis dalam Renstra 2021-2026 Satuan Polisi Pamong Praja adalah pemenuhan tugas pokok dan fungsi SATPOL PP yang lebih berorientasi pada hasil dan dampak. Sehingga dengan target tersebut, ketentraman, ketertiban dan keindahan dapat diwujudkan di Kutai Kartanegara.

Arah kebijakan SATPOL PP dalam menyikapi isu strategis tersebut adalah percepatan Langkah dan akselerasi dalam mencapai target kinerja, penguatan peran dan fungsi SATPOL PP di masyarakat dan penguatan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis sumber daya anggota SATPOL PP. Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan SATPOL PP.

Tabel III.5
tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan SATPOL PP

	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah	jumlah pelanggaran produk hukum daerah	melaksanakan penegakan perda/perkada (tipiring) bekerjasama dengan Instansi terkait (TNI POLRI KEJAKSAAN KEHAKIMAN)	melaksanakan penegakan perda/perkada melalui proses penyidikan dan penyelidikan dengan memberdayakan PPNS sampai ke tahap persidangan tipiring
					melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan Perda dan Perkada
				Melaksanakan patroli dan deteksi dini	melaksanakan pengawasan pelanggaran perda dan perkada
					membentuk regu-regu kesiap-siagaan dini.
					Membuat aplikasi layanan SATPOL PP siaga
				Melaksanakan peingkatan kapasitas aparatur SATPOL PP	melaksanakan diklat mengenai penegakan perda secara berkala



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

- a. Visi RPJMD Kab.Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 **"Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"**. Selanjutnya Visi dan misi RPJMD Kab.Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran. Misi pertama adalah, **"Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani "**, dengan **Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA)**, merupakan Program Dedikasi Kukar IDAMAN, yang ditujukan untuk membangun mindset dan culturset tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi.
- b. Pada perencanaan untuk tahun 2026, sesuai dengan hasil analisa kebutuhan, maka SATPOL PP merencanakan 2 program, 11 kegiatan dan 38 subkegiatan. Sebagai OPD yang bertanggungjawab terhadap penegakan perda, maka kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat juga bersentuhan dengan tugas pokok itu sendiri seperti penertiban jalur hijau serta jalan utama dari PKL di kecamatan tenggarong, loa kulu dan loa janan, penegakan perda seperti perda KTP, Perda Miras dan Perda Prostitusi di wilayah Sanga-Sanga, Muara Jawa, Samboja, Kota Bangun dan Tenggarong Seberang. Juga terdapat penertiban Perijinan baik itu IMB maupun ijin usaha yang terfokus di kecamatan Tenggarong, Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Muara Jawa, Samboja dan Sanga-Sanga. SATPOL PP juga melakukan patroli rutin di seluruh wilayah Kutai Kartanegara untuk menjaga ketertiban, keamanan dan keindahan (K3). Disamping itu, SATPOL PP juga akan melakukan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat mengenai ketertiban, keamanan dan keindahan (K3) serta penanggulangan bencana. Kebutuhan anggaran SATPOL PP pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 39.679.659.345,- .
- c. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program, kegiatan

dan indikator pada RENSTRA 2021-2026 SATPOL PP sudah tidak sesuai lagi. Hal ini menyebabkan perlunya penyesuaian pada renja 2026. Beberapa diantaranya adalah :

- 1) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan, satuan target pada RENSTRA adalah kasus, menjadi laporan, sehingga targetnya berubah dari 1484 kasus menjadi 12 laporan dengan pagu sebesar Rp 800.000.000,00 .
- 2) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum, satuan target pada RENSTRA adalah regu, menjadi dokumen, sehingga targetnya berubah dari 25 regu menjadi 4 dokumen dengan pagu sebesar Rp 382.694.000,00 . kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Meningkatkan Kemampuan dasar anggota Satuan Linmas (Diklatsar) dengan jumlah 60 orang perkecamatan di 7 kecamatan, Pembentukan Satgas Linmas dan Pengadaan Sarana & Prasarana, Mendeteksi Rawan Bencana di 20 Kecamatan, Pengadaan Seragam Satlinmas di 20 Kecamatan yg berjumlah 3112 orang, Melakukan Pembinaan Anggota Satlinmas yang ada di 20 kecamatan berupa : Apel , Piket linmas dan Patroli Keliling.
- 3) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota, satuan target pada RENSTRA adalah kali, menjadi laporan, sehingga targetnya berubah dari 4 kali menjadi 25 laporan dengan pagu sebesar Rp 150.000.000,00 , prioritas pada kegiatan ini adalah memaksimalkan pelaksanaan PERDA/PERKADA yang mengandung sanksi baik ke masyarakat sosialisasi langsung ke masyarakat di 225 desa/kelurahan maupun dengan OPD terkait.
- 4) Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah , satuan target pada RENSTRA adalah pelanggaran, menjadi laporan, sehingga targetnya berubah dari 4 pelanggaran menjadi 240 laporan dengan pagu sebesar Rp 200.000.000,00 , prioritas pada kegiatan ini adalah pengawasan berkala dan terstruktur di seluruh kecamatan, Dibutuhkan pelibatan personel tambahan, peningkatan intensitas patroli.
- 5) Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah satuan target pada RENSTRA adalah kali, menjadi laporan, sehingga targetnya berubah dari 50 kali menjadi 240 laporan dengan pagu sebesar Rp 350.000.000,00 , prioritas pada kegiatan ini adalah Peningkatan intensitas operasi penegakan hukum (razia, penertiban), Penguatan kapasitas personel dalam penindakan

berikut disajikan tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SATPOL PP Tahun 2026.

Kod e	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah		43 persen	2.843.086.000			43 persen	1.082.476.700	
			Persentase Penanganan Gangguan K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)		100 persen				100 persen		
1	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		jumlah penurunan angka penanganan gangguan trantibum		1100 kasus	1.993.086.000	APBD		1100 kasus	602.186.800	
	1	1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kutai Kartanegara	12 Laporan	800.000.000	APBD	- Pelaksanaan Patroli di 20 kecamatan - Pengawasan Bupati dan Pejabat Penting Daerah - Penambahan jumlah personil di setiap kegiatan pengamanan	1484 kasus	325.698.000	

2	1.05.02.2.01.0016 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kutai Kartanegara	12	Laporan	50.000.000	APBD		12	kasus	50.000.000
3	1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	4	Dokumen	100.000.000	APBD		4	Dokumen	17.478.000
4	1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kutai Kartanegara	2	Dokumen	382.694.000	APBD		25	Dokumen	75.527.500
5	1.05.02.2.01.0014 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kutai Kartanegara	21	Orang	500.000.000	APBD		200	Orang	100.000.000
6	1.05.02.2.01.0006 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kutai Kartanegara	5	Dokumen	-	APBD	kerjasama dengan 24 Instansi terkait penegakan perda	5	Dokumen	23.483.300

	7	1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketnteraman dan Ketertiban Umum		Satpol PP	24	Unit	150.392.000	APBD		1	Dokumen	-
	8	1.05.02.2.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Satpol PP	100	Laporan	10.000.000	APBD		100	Laporan	10.000.000
2	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		jumlah perda yang ditegakkan	Kab Kukar	3	angka	700.000.000	APBD		3	angka	420.289.900
	9	1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Kab Kukar	25	Laporan	150.000.000	APBD	sosialisasi perda dilaksanakan di 20 kecamatan	4	Laporan	97.767.500
	10	1.05.02.2.02.0012 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Kukar	240	Laporan	200.000.000	APBD	penambahan honor anggota Cipkon	100	Laporan	120.000.000
	11	1.05.02.2.02.0011 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Kab Kukar	240	Laporan	350.000.000	APBD	Penambahan Honor Tim Tipiring, penambahan SPPD	100	Laporan	202.522.400
3	1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang dibina		1	orang	150.000.000	APBD		1	orang	60.000.000

	12	1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Kantor SATPOL PP	4	Laporan	150.000.000	APBD	menambahkan target menjadi 3 orang PPNS	1	Laporan	60.000.000
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		nilai SAKIP Perangkat Daerah		76		36.836.573.345			76		23.384.652.756
4	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		26	dokumen	500.000.000	APBD		26	dokumen	520.000.000
	13	1.05.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kantor SATPOL PP	31	Data	200.000.000	APBD	penguatan pelaksanaan satudata KUKAR	16	Dokumen	230.000.000
	14	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor SATPOL PP	6	dokumen	150.000.000	APBD	pergeseran 25.000.000 dari Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11	dokumen	70.000.000

	15	1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor SATPOL PP	12	laporan	50.000.000	APBD	bertambahnya data-data dan aplikasi yang harus dilengkapi, sehingga perlu penambahan rapat-rapat baik internal dan mengundang narasumber	15	laporan	70.000.000
	16	1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor SATPOL PP	1	laporan	100.000.000	APBD	penguatan kualitas dokumen capaian kinerja	1	laporan	150.000.000,00
5	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		17	dokumen	27.375.581.153	APBD		17	dokumen	15.120.160.065
	17	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor SATPOL PP	4488	Orang/Bulan	26.875.581.153	APBD		1980	dokumen	14.998.354.465
	18	1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor SATPOL PP	1	laporan	50.000.000	APBD	bertambahnya data-data dan aplikasi yang harus dilengkapi, sehingga perlu penambahan rapat-rapat baik internal dan mengundang narasumber	1	laporan	21.805.600

	19	1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kantor SATPOL PP	12	laporan	450.000.000	APBD	honorarium PA, Bendahara, 5 KPA, 5 Bendahara Pembantu, PP Keuangan, PP Barang	15	laporan	100.000.000
6	1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah				25.000.000					
	20	1.05.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor SATPOL PP	1	dokumen	25.000.000	APBD		1	dokumen	25.000.000
7	1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	dokumen	219.580.000	APBD		13	dokumen	63.290.066
	21	1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		5	Paket	-	APBD		50	Paket	160.000.000
	22	1.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor SATPOL PP	10	dokumen	19.580.000	APBD		10	dokumen	19.580.000
	23	1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		25	Orang	50.000.000					20.000.000

	24	1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor SATPOL PP	50	Orang	150.000.000	APBD		50	Orang	23.710.066
8	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		6	layanan	1.055.000.000	APBD		6	layanan	196.096.500
	25	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. KUKAR	1	paket	135.000.000	APBD		67	paket	80.000.000
	26	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. KUKAR	6	paket	550.000.000	APBD		21	paket	44.600.000
	27	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. KUKAR	2	paket	20.000.000	APBD		7	paket	6.031.500
	28	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	laporan	300.000.000	APBD		225	laporan	65.465.000
	29	1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		3	dokumen	50.000.000	APBD			dokumen	
9	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12	bulan	5.861.412.192	APBD		12	bulan	7.095.987.192
	30	1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	laporan	20.000.000	APBD		12	laporan	4.015.000
	31	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. KUKAR	12	laporan	150.000.000	APBD		12	laporan	100.000.000

	32	1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. KUKAR	12	laporan	69.440.000	APBD		12	laporan	25.000.000
	33	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	laporan	5.621.972.192	APBD		12	laporan	6.966.972.192
10		1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara		21,87 %	unit	1.700.000.000	APBD		22%	unit	452.408.999
	34	1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kantor SATPOL PP	84	unit	1.170.000.000	APBD	Kenaikan Harga BBM, Sparepart dan Pajak	81	unit	354.355.000
	35	1.05.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kantor SATPOL PP	1	unit	30.000.000	APBD	Penyesuaian biaya sewa webhosting (sesuai pembayaran webhosting tahun 2022)	2	unit	20.000.000
	36	1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kantor SATPOL PP	1	unit	500.000.000	APBD	Dengan jumlah pagu awal yang tersedia (Rp. 78.054.000), masih dirasa belum mencukupi pembiayaan. Oleh karena itu diperlukan tambahan anggaran Rp. 45.000.000 untuk biaya pengerjaan.	2	unit	78.053.999

11	1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Kantor SATPOL PP	100	persen	100.000.000	APBD		100	persen	250.000.000
	37	1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		8	Unit	-	APBD				250.000.000
	38	1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		6	Unit	100.000.000					
39.679.659.345												



Rencana Kerja (RENJA) disusun dimaksudkan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang akan digunakan dalam penyelenggaraan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Produk hukum daerah, serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana Kerja (RENJA) ini disusun sebagai pedoman bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Tujuan, Sasaran, Kebijakan,

Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu dari tahun 2021 - 2026.

- a. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian :
 - 1) Percepatan langkah dan akselerasi dalam pencapaian target kinerja.
 - 2) Penguatan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
 - 3) Peningkatan kualitas Bimbingan Teknis maupun Diklat untuk meningkatkan SDM bagi Anggota Satpol PP.
 - 4) Peningkatan peran serta OPD pemangku PERDA/PERKADA dalam pelaksanaan penegakan PERDA/PERKADA.
- b. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah – kaidah dalam pelaksanaannya, yaitu :
 - 1) Renja SATPOL PP Tahun 2026 tidak hanya memuat kegiatan – kegiatan dalam rangka pemenuhan tugas pokok dan fungsi SATPOL PP, tetapi juga memuat rancangan kerangka Pelayanan Publik yang membawa dampak penurunan angka pelanggaran trantibum di masyarakat.
 - 2) Seluruh bidang dan seksi di dalam tubuh SATPOL PP berkewajiban untuk melaksanakan program– program Rencana Kerja Tahun 2026 ini dengan sebaik–baiknya.
 - 3) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, Renja SATPOL PP ini disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja pemerintah Daerah), Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-13708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang perubahan kedua atas Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021

c. Rencana Tindak Lanjut :

- 1) Menyusun KAK pelaksanaan kegiatan.
- 2) Menyusun rencana aksi pelaksanaan kegiatan.
- 3) Melakukan kegiatan pendampingan, pengawasan, evaluasi dan monitoring berkala atas pelaksanaan kegiatan.

Meskipun Rencana Kerja (RENJA) ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Rencana Kerja (RENJA) ini. Dengan demikian kesungguhan dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja. Sehingga Visi visi dan misi RPJMD Kab.Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 "**Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia "** dapat tercapai.

Tenggarong, Juli 2025

